



## LAMPIRAN I.

### Keterkaitan Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019

#### 1. PRIORITAS NASIONAL PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	OPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<p><b>Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perijinan pusat dan daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat investasi</li> <li>• Pelaksanaan Harmonisasi, sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat/Kementerian Lembaga dan Daerah</li> <li>• Penyederhanaan peraturan dan perizinan</li> </ul>	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	
2	<p><b>Peningkatan Persaingan Usaha yang sehat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan Hukum terhadap Praktek Anti Persaingan Usaha yang Sehat</li> <li>• Pengawasan Kegiatan Usaha yang sesuai dengan mekanisme Persaingan Usaha yang Sehat</li> <li>• Pencegahan terhadap praktek persaingan usaha yang tidak sehat</li> </ul>	Program perluasan jangkauan pemasaran	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan	
3	<p><b>Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem perizinan nasional</li> <li>• Penyusunan SOP perizinan dan SOP PTSP sesuai standar nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</li> <li>• Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal</li> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur</li> </ul>	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	OPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Pemantauan PTSP di daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</li></ul>	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika</li></ul>	
4	<b>Percepatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Investasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Penyelesaian pengaduan masalah investasi</li></ul>	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal	
5	<b>Perencanaan investasi sektor strategis</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Perencanaan Investasi Industri prioritas</li><li>Perencanaan Investasi pariwisata</li><li>Perencanaan investasi sektor maritim dan logistik</li><li>Perencanaan investasi di Kawasan Strategis Nasional</li><li>Perencanaan investasi Infrastruktur Prioritas</li></ul>	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal	
6	<b>Peningkatan Kemudahan Berusaha</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan Kemudahan Memulai Usaha</li><li>Perbaikan Kemudahan Mendirikan Bangunan</li><li>Perbaikan Kemudahan Pendaftaran Properti</li><li>Perbaikan Kemudahan Penyambungan Listrik</li><li>Perbaikan Kemudahan Pembayaran Pajak</li><li>Perbaikan Kemudahan Peningkatan Akses Perkreditan</li><li>Perbaikan Kemudahan Penegakan Kontrak</li><li>Perbaikan Kemudahan Penyelesaian Perkara Kepailitan</li><li>Perbaikan Kemudahan Terhadap Investor Minoritas</li><li>Perbaikan Kemudahan Perdagangan Lintas Negara</li></ul>	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal	



## 2. PRIORITAS NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR NON MIGAS

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Peningkatan Realisasi investasi berorientasi ekspor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi permasalahan investasi</li> <li>• Fasilitasi investasi industri berorientasi ekspor</li> <li>• Pemantauan dan pengendalian realisasi investasi berorientasi ekspor</li> <li>• Peningkatan promosi investasi berorientasi ekspor</li> </ul>	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal	
2	<b>Peningkatan ekspor produk KUMKM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas ekspor</li> <li>• Perluasan fasilitasi ekspor</li> <li>• Peningkatan diversifikasi dan kualitas produk</li> <li>• Peningkatan partisipasi KUMKM dalam jaringan/kemitraan rantai nilai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program standarisasi produk Usaha Mikro</li> <li>• Program perluasan jangkauan pemasaran</li> <li>• Program perkuatan permodalan Usaha Mikro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</li> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan</li> </ul>	
3	<b>Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana pengujian mutu dan standar</li> <li>• Penyediaan sistem informasi terkait standar dan mutu yang berlaku di negara tujuan ekspor</li> <li>• Peningkatan keberterimaan sertifikasi mutu</li> <li>• Pengembangan potensi ekspor daerah</li> </ul>	Program standarisasi produk Usaha Mikro	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
4	<b>Penguatan market intelligence, promosi, dan asistensi ekspor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan promosi ekspor melalui promosi terpadu (nation branding)</li> <li>• Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor</li> </ul>	Program perluasan jangkauan pemasaran	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	jasa prioritas <ul style="list-style-type: none"><li>• Identifikasi peluang pasar produk barang dan jasa (termasuk produk kreatif dan produk halal)</li><li>• Pelaksanaan market intelligence yang berkualitas</li></ul>			
5	<b>Pengembangan fasilitasi ekspor</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kelancaran impor barang modal dan bahan baku untuk produksi ekspor nonmigas</li><li>• Mengoptimalkan penerapan single window untuk proses ekspor-impor</li><li>• Fasilitasi pembiayaan ekspor</li></ul>	Program perluasan jangkauan pemasaran	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan	
6	<b>Peningkatan efektivitas kerja sama perdagangan internasional (MARKET ACCESS)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perlindungan kepentingan nasional dari praktek-praktek perdagangan internasional yang tidak adil</li><li>• Optimalisasi peran perwakilan RI di luar negeri</li><li>• Peningkatan akses pasar barang olahan dan jasa Indonesia di pasar internasional</li><li>• Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional</li><li>• Penyelarasan hasil perundingan dengan kebijakan nasional di dalam negeri</li></ul>	Program Kerjasama Bidang Perdagangan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota (skala lokal)



### 3. PRIORITAS NASIONAL REFORMASI AGRARIA

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Identifikasi dan Penyiapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi dan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)</li> <li>Identifikasi HGU yang habis masa berlakunya dan Identifikasi Tanah Terlantar</li> <li>Identifikasi Tanah Milik untuk Legalisasi Aset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Aset</li> <li>Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum</li> </ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanahan	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota (Aset Badan Milik Daerah)
2	<b>Penyerahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)</b> Legalisasi Aset (PRONA, Lintas Sektor)	Program Pengamanan Aset	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanahan	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota (Aset Badan Milik Daerah)
3	<b>Kepastian Hukum Hak Atas Tanah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Cakupan Peta Dasar Pertanahan</li> <li>Peningkatan Cakupan Bidang Tanah Bersertifikat</li> <li>Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan</li> <li>Sosialisasi Peraturan Terkait Tanah Adat/Ulayat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota</li> <li>Program Pengamanan Aset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanahan</li> </ul>	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota
4	<b>Penerimaan Juru Ukur Pertanahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis Jabatan</li> <li>Penerimaan PNS Juru Ukur</li> <li>Penyediaan Anggaran</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
5	<b>Pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah</li> <li>Pembentukan Kelembagaan Penyediaan Tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Aset</li> <li>Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanahan</li> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan</li> </ul>	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		Kepentingan Umum	Pembangunan Bidang Pertanahan	

#### 4. PRIORITAS NASIONAL REFORMASI FISKAL

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Optimalisasi Penerimaan Negara</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi Perpajakan</li><li>• Optimalisasi PNPB</li></ul>	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota
2	<b>Peningkatan Kualitas Belanja Negara</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial yang tepat sasaran</li><li>• Peningkatan efektivitas transfer ke daerah dan Dana Desa</li></ul>	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota
3	<b>Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur</b>  Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota

#### 5. PRIORITAS NASIONAL REVOLUSI MENTAL

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum</li><li>• Penegakan Hukum yang Berkualitas</li></ul>	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan</li> <li>• Pendidikan Politik dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik</li> </ul>			
2	<b>Reformasi Birokrasi Pemerintahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Jumlah Ijin dan Transparan</li> <li>• Promosi Layanan Elektronik menuju E-budgeting, E-reporting dan Complaint Center</li> <li>• Penerapan Sistem Reward &amp; Punishment dan Keteladanan Pimpinan</li> </ul>	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika	
		Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintah Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	
3	<b>Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan</li> <li>• Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri</li> <li>• Internalisasi Nilai – nilai dan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat</li> </ul>	Program perluasan jangkauan pemasaran	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan	
4	<b>Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Berbasis Karakter</li> <li>• Lingkungan Satuan Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan</li> <li>• Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Keragaman dan Toleransi</li> <li>• Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal</li> <li>• Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kebudayaan</li> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan</li> </ul>	
5	<b>Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toleransi dan Hidup Rukun</li> </ul>	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Peran Lembaga Agama, Keluarga dan Media Publik Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti</li><li>Gotong Royong, Kesukarelawan dan Solidaritas</li></ul>	Kenyamanan lingkungan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	

## 6. PRIORITAS NASIONAL PELAYANAN PENDIDIKAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kurikulum yang Andal</li><li>Sistem Penilaian yang Komprehensif dan Kredibel</li><li>Tenaga Pendidik yang Profesional dan Kompeten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Penerapan Kurikulum</li><li>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan	
2	<b>Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Revitalisasi LPTK</li><li>Peningkatan Profesionalisme Guru dan Dosen</li><li>Distribusi dan Pemerataan Guru dan Dosen</li><li>Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Dosen</li><li>Peningkatan Kapasitas Akademik Dosen</li></ul>	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan	
3	<b>Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sekolah Berbudaya Mutu</li><li>Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah</li><li>Assesment Mutu Satuan Pendidikan</li></ul>	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan	
4	<b>Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus</li><li>Bantuan Biaya Operasional Pendidikan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Peningkatan Prestasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Prestasi</li> </ul>	
5	<b>Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan</li> <li>Afirmasi Sarpras Khusus, Daerah 3T dan PT Luar Jawa</li> <li>Peningkatan Peran Pemda</li> <li>Kebutuhan Infrastruktur Pendukung</li> </ul>	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan	
6	<b>Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan</li> <li>Penciptaan lingkungan pendidikan berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan</li> </ul>	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kebudayaan	
7	<b>Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Otonomi PT</li> <li>Pengembangan Prodi Inovatif</li> <li>Akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi</li> <li>Perlindungan Prodi Langka Peminat</li> <li>Penguatan Kerjasama Antar Perguruan Tinggi</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
8	<b>Peningkatan Kapasitas Iptek, Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Infrastruktur Iptek di Perguruan Tinggi</li> <li>Peningkatan Kapasitas Penelitian Dosen dan Mahasiswa</li> <li>Penerbitan Jurnal Ilmiah, Publikasi dan Sitasi</li> <li>Perolehan HAKI dan Paten dari Litbang PT</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Penerapan Hasil Litbang PT di masyarakat</li></ul>			
9	<b>Peningkata Relevansi Pendidikan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pengabdian Masyarakat</li><li>Pendidikan Vokasi</li><li>Pendidikan kewirausahaan</li><li>Penguatan Kemitraan dengan Dunia usaha – Dunia Industri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan</li><li>Program Pendidikan Kesetaraan</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan	

#### 7. PRIORITAS NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Pembiayaan Kesehatan</li><li>Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan</li><li>Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Berkualitas</li><li>Penguatan Sistem Informasi, Manajemen dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</li><li>Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</li><li>Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</li><li>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit</li><li>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu</li><li>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu</li><li>Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
2	<p><b>Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advokasi Regulasi Gerakan Masyarakat Sehat</li> <li>• Kampanye Hidup Sehat</li> <li>• Konsumsi Pangan Sehat</li> <li>• Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini</li> <li>• Lingkungan Sehat</li> <li>• Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras</li> <li>• Penurunan Stress dan Keselamatan Berkendara</li> </ul>	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan	
3	<p><b>Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak</li> <li>• Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan</li> <li>• Pendidikan dan pemberdayaan perempuan serta perkembangan anak usia dini</li> <li>• Manajemen dan pencegahan penyakit</li> <li>• Peningkatan sanitasi dan akses air bersih</li> <li>• Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana</li> <li>• Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan</li> </ul>	<p>Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak</p> <p>Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan</p> <p>Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan</p> <p>Program Keluarga Berencana</p>	<p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pangan</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	Kampanye			
4	<b>Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan pelayanan KB</li><li>• Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB</li><li>• Pembinaan Remaja</li><li>• Pembangunan Keluarga</li><li>• Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Keluarga Berencana</li><li>• Program Bina Keluarga</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

#### 8. PRIORITAS NASIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst)</li><li>• Penyediaan Perumahan Baru MBR</li><li>• Fasilitasi Keswadayaan Masyarakat</li><li>• Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR</li><li>• Optimalisasi Peran BUMN terkait perumahan</li></ul>	Program perumahan permukiman	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2	<b>Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman kumuh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan berbasis komunitas (Perbedayaan masyarakat yang berkelanjutan)</li></ul>	Program perumahan permukiman	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan pendataan (baseline dan nett kumuh) dan perencanaan</li> <li>Penguatan kelembagaan di daerah dalam upaya penangkalan kumuh</li> <li>Konsolidasi lahan (<i>land consolidation</i>) untuk penanganan permukiman kumuh</li> </ul>			
3	<b>Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Infrastruktur Air minum dan Sanitasi terintegrasi</li> <li>Peningkatan Demand Terhadap Hygiene dan Sanitasi (PHBS)</li> <li>Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi</li> </ul>	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4	<b>Peningkatan Ketersediaan Air Baku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)</li> <li>Simpan Air (Pengelolaan Air yang Berkelanjutan)</li> <li>Hemat Air (Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Air Minum)</li> </ul>	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

#### 9. PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain</li> <li>Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan</li> <li>Pengendalian Konversi Lahan Padi</li> <li>Reformasi Agraria</li> </ul>	Program penyediaan Sarana Prasarana budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanian	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit</li><li>Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih</li><li>Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian</li></ul>			
2	<b>Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pemantauan dan pengendalian harga pangan</li><li>Cadangan Pangan Pemerintah</li><li>Pengendalian impor dan tata niaga pangan</li><li>Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan</li><li>Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)</li></ul>	Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pangan	
3	<b>Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi</li><li>Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan)</li><li>Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi</li><li>Peningkatan kualitas dan keamanan pangan</li></ul>	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pangan	
4	<b>Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)</li><li>Asuransi Pertanian</li><li>Pengembangan Budidaya Adaptif</li><li>Bantuan input produksi akibat bencana (puso)</li></ul>	Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanian	



## 10. PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN ENERGI

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Penyediaan Energi Primer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi</li> <li>• Perbaikan Tata Kelola Migas</li> <li>• Pengembangan Lapangan Migas Baru</li> <li>• Pengendalian Produksi Batubara</li> </ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud
2	<b>Pengembangan Cadangan Energi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG</li> <li>• Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak</li> <li>• Pembentukan Cadangan Penyangga Energi</li> </ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud
3	<b>Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan PLT Matahari, Mikrohidro, Angin, Arus Laut dan Nuklir</li> <li>• Penyempurnaan Feed In Tariff dan Subsidi EBT</li> <li>• Pembangunan PLTP</li> <li>• Pengembangan industri penunjang EBT</li> <li>• Pembangunan Bioenergi</li> </ul>	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	
4	<b>Peningkatan Aksesibilitas Energi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Industri dan Komponen Dalam Negeri</li> <li>• Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Rumah Tangga dan Transportasi</li> </ul>	Program Upaya Konservasi Energi	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan Penggunaan Batubara dan Gas Dalam Negeri</li><li>Pembangunan Receiving Terminal dan Regasifikasi Unit, serta Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi</li></ul>			
5	<b>Efisiensi dan Konservasi Energi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO)</li><li>Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien</li><li>Dukungan Pendanaan Bagi Konservasi Energi</li></ul>	Program Upaya Konservasi Energi	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	
6	<b>Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Efisien, Transparan, dan Tepat Sasaran</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Monitoring dan Evaluasi Kualitas dan Verifikasi Volume BBN untuk Biofuel</li><li>Optimalisasi Kebijakan Tarif dan Subsidi Energi dan Listrik</li></ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota

#### 11. PRIORITAS NASIONAL KELAUTAN DAN KEMARITIMAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Konektivitas (tol) laut dan industri maritim</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan/pengembangan pelabuhan umum</li><li>Pengembangan Layanan Pelayaran nasional</li><li>Insentif Usaha dan Iklim Investasi</li><li>Penguatan SDM Perkapalan dan Kepelautan</li></ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan</li> <li>• Peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran</li> </ul>			
2	<p><b>Industri Perikanan dan Hasil Laut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut</li> <li>• Pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan</li> <li>• Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan</li> <li>• Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi iptek</li> <li>• Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta karantina ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan</li> <li>• Program pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan</li> </ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan	
3	<p><b>Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir</li> <li>• Konservasi pesisir dan laut</li> <li>• Rehabilitasi kawasan pesisir dan laut</li> <li>• Pengendalian pencemaran pesisir dan laut</li> <li>• Pengelolaan Wisata Bahari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau</li> <li>• Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan</li> </ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	
4	<p><b>Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur sentra nelayan dan pelaku KP lainnya</li> <li>• Peningkatan akses terhadap bantuan/stimulan, akses modal dan bantuan sarana produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan</li> <li>• Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan</li> </ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan keterampilan dan perlindungan nelayan</li><li>Sistem informasi kelautan dan perikanan</li></ul>			
5	<b>Penanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut</li><li>Penguatan lembaga, aparat pengawas dan penegak hukum, serta masyarakat</li><li>Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Perijinan Kapal Perikanan, Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran</li></ul>	Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan	
6	<b>Perundingan Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pemetaan dan Perundingan penetapan batas laut</li><li>Penamaan dan pendaftaran pulau</li><li>Pengelolaan pulau-pulau kecil</li></ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota

## 12. PRIORITAS NASIONAL ANTARKELOMPOK PENDAPATAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial</li><li>Keahlian Pekerja</li><li>Layanan Informasi Pasar kerja</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</li><li>Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iklim Investasi</li> <li>• Infrastruktur Padat Pekerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja</li> </ul>		
2	<p><b>Perkuatan basis perekonomian perdesaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga Keuangan berbasis komunitas</li> <li>• Keterampilan teknis</li> <li>• Penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi</li> <li>• Pendampingan Masyarakat Desa</li> </ul>	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	
3	<p><b>Pengembangan kewirausahaan</b></p> <p>Peningkatan Produktivitas</p>	<p>Program perluasan jangkauan pemasaran</p> <p>Program perkuatan permodalan usaha mikro</p>	<p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p>	
4	<p><b>Perluasan pelayanan dasar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Layanan Dasar</li> <li>• Peningkatan Tata Kelola</li> <li>• Pendampingan Masyarakat</li> </ul>	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Sosial	
5	<p><b>Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bantuan Sosial)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)</li> <li>• Subsidi pangan masyarakat berpenghasilan rendah (RASKIN/RASTRA)</li> <li>• Bantuan iuran jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)</li> </ul>	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Sosial	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)</li><li>Bantuan sosial di luar sistem keluarga</li></ul>			
6	<b>Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Keterampilan Usaha</li><li>Akses Pembiayaan</li><li>Kualitas Produk dan Akses Pemasaran</li><li>Koperasi dan Kemitraan Usaha</li><li>Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program perkuatan permodalan usaha kreatif</li><li>Program perkuatan permodalan Usaha Mikro</li><li>Program standarisasi produk Usaha Mikro</li><li>Program perluasan jangkauan pemasaran</li><li>Program penguatan kelembagaan koperasi</li><li>Program legalisasi usaha kreatif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan</li></ul>	

### 13. PRIORITAS NASIONAL DAERAH PERBATASAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Pengembangan 10 PKSN sebagai Pusat Pengembangan Perbatasan Negara</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan sarana dan prasarana di kota pusat pertumbuhan</li><li>Pembangunan sarpras kemaritiman penunjang pengelolaan sumber daya laut</li><li>Pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi perdagangan di kota pusat pertumbuhan</li><li>Regulasi perdagangan ekspor dan impor melalui perbatasan negara</li></ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan industri hilir dan sarana science park dan techno park penunjang kawasan industri Pembangunan industri hilir dan Industri Kecil Menengah</li> <li>• Peningkatan potensi komoditas unggulan perbatasan</li> <li>• Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan</li> </ul>			
2	<p><b>Membuka Isolasi Lokpri, peningkatan Sarpras, SDM dan Ekonomi Perbatasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka isolasi</li> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan, TIK, dan penyiaran</li> <li>• Pembangunan Sarana dan Prasana Pemasaran</li> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan pelatihan SDM</li> <li>• Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan</li> <li>• Pembangunan perumahan, kawasan permukiman layak huni dan penyediaan air baku Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
3	<p><b>Pengembangan PLBN Terpadu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Infrastruktur/ Gedung CIQS Terpadu</li> <li>• Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan <i>Custom, Imigrasi, Quarantine and Security</i></li> <li>• Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Pegawai PLBN</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan Jalan Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi</li></ul>			
4	<b>Pengamanan Sumber Daya dan Batas Wilayah Darat, laut dan udara</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kerjasama internasional pengamanan kawasan perbatasan</li><li>Pembangunan Pos TNI dengan fasilitas pengamanan penunjang</li><li>Patroli pengamanan batas wilayah</li><li>Pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara</li></ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
5	<b>Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Sosial – Ekonomi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Penataan kelembagaan diplomasi perundingan</li><li>Penguatan koordinasi materi dan instrumen perundingan antar K/L</li><li>Penyelesaian segmen batas negara</li><li>Pembuatan peta kawasan perbatasan, database regulasi, dan dokumen teknis pengelolaan perbatasan</li></ul>	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota

#### 14. PRIORITAS NASIONAL DAERAH TERTINGGAL

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Pengembangan Ekonomi Lokal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry</li> <li>• Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM</li> <li>• Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran dan Kerjasama Antar Daerah</li> <li>• Perizinan Usaha dan Penguatan Kelembagaan Usaha</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Petani/Nelayan/Pelaku Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> </ul>	<p>Urusan Pembangunan Bidang Pertanian</p>	
2	<p><b>Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Ketenagalistrikan</li> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan</li> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>• Pemenuhan perumahan dan Permukiman layak huni</li> </ul>	<p>Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota</p> <p>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu</li> <li>• Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Rumah sakit</li> </ul> <p>Program perumahan permukiman</p>	<p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan</p>	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan air bersih dan sanitasi</li><li>• Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah</li></ul>		Permukiman	
		Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	
3	<b>Peningkatan SDM dan Iptek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan dan Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidikan dan Kesehatan</li><li>• Pembangunan SMK dan Politeknik</li><li>• Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja</li><li>• Inovasi Daerah, Pengembangan Inkubator Bisnis dan Technopark berbasis Potensi Sumber Daya Lokal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li><li>• Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan	
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas</li><li>• Program Peningkatan Kesempatan Kerja</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja	
4	<b>Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</li><li>• Pembangunan Dermaga</li><li>• Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bandara</li></ul>	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Moda Transportasi Darat, Udara, Laut dan ASDP</li> <li>• Pelayanan Angkutan Perintis</li> <li>• Pembangunan Perkeretaapian</li> </ul>	Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perhubungan	
		Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

#### 15. PRIORITAS NASIONAL DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)</li> <li>• Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan</li> <li>• Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi</li> <li>• Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah</li> <li>• Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi</li> </ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud
2	<b>Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk Permukiman Transmigrasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan BUMDesa dan Penguatan Kelembagaan BUMDesa</li> <li>• Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan</li> </ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	terutama UMKM <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan &amp; pengembangan Teknologi Tepat Guna</li><li>• Penguatan Permodalan dan Akses Pasar</li></ul>			
3	<b>Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata</li><li>• Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah</li><li>• Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa</li><li>• Pengembangan lembaga keuangan di daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha</li><li>• Pembangunan dan/atau Pemeliharaan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan</li><li>• Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi</li><li>• Pembangunan Suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri</li><li>• Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing</li><li>• Peningkatan peran Pelayanan Terpadu Satu</li></ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	Pintu di daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan inovasi dan reatifitas lokal</li> </ul>			
4	<b>Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Transmigrasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan</li> <li>• Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi</li> <li>• Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim</li> <li>• Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna</li> <li>• Penguatan hak desa dalam pengelolaan hutan dan kerjasama pengelolaan/ shareholding</li> </ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud
5	<b>Penguatan Pemerintahan Desa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah da Pemerintahan Desa dalam tata kelola pemerintahan desa</li> <li>• Penataan wilayah, penataan kewenangan dan administrasi pemerintahan desa</li> <li>• Pembinaan kelembagaan pemerintahan desa</li> <li>• Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah da Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan aset pemerintahan desa</li> </ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan kapasitas desa dalam penyediaan informasi desa dan evaluasi perkembangan desa</li></ul>			
6	<b>Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa</li><li>Pendidikan di desa berbasis ketrampilan dan kewirausahaan</li><li>Peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kader kesehatan</li><li>Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal</li><li>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas</li><li>Penyiapan teknologi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa</li></ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud
7	<b>Pengawasan Impelementasi UU Desa Secara Sistematis, Konsisten dan Berkelanjutan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Konsolidasi Lintas Kementerian/ Lembaga dalam perencanaan, pengendalian dan pembangunan desa</li><li>Sosialisasi dan penyusunan revisi berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa</li></ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distribusi, supervisi, pemantauan DD dan ADD agar berjalan secara efektif dan efisien</li> </ul>			

## 16. PRIORITAS NASIONAL PERKOTAAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Mewujudkan Sistem Perkotaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan KSN Perkotaan</li> <li>Peningkatan Konektivitas</li> </ul>	Program Perencanaan Ruang Kota	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	<b>Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman, dan Layak Huni, serta Tertata Baik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya sarana permukiman</li> <li>Tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan</li> <li>Tersedianya sistem transportasi publik</li> <li>Penanggulangan kemiskinan perkotaan</li> </ul>	Program perumahan permukiman	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota</li> <li>Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan</li> </ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perhubungan	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</li> <li>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB</li> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja</li> </ul>	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3	<ul style="list-style-type: none"><li>Pendidikan</li><li>Kesehatan</li></ul> <b>Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan</li><li>Green transportation</li><li>Green waste</li><li>Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Perkotaan</li><li>Membangun ketahanan kota (urban resilience)</li></ul>	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan	
		<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</li><li>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</li><li>Program Perencanaan Ruang Kota</li><li>Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota</li><li>Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan</li><li>Program Penanggulangan Bencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat</li></ul>	
4	<b>Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>City Branding</li><li>Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</li><li>Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</li><li>Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
5	<b>Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem, peraturan dan prosedur Kota Berkelanjutan</li> <li>Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota</li> <li>Membentuk dan Menguatkan status Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan</li> <li>Basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik</li> <li>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</li> <li>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Program Pengendalian Pembangunan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Statistik</li> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah</li> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>	

#### 17. PRIORITAS NASIONAL STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Pelayanan Prima Kepolisian</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi Pelayanan Kepolisian</li> <li>Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian</li> <li>Penguatan Sistem Kepolisian</li> <li>Profesionalisme SDM</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
2	<b>Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF</li> <li>Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan</li> <li>Pembangunan Sarpras Alutsista TNI</li> <li>Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI</li> <li>Penguatan Industri Pertahanan</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3	<b>Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teknologi Persandian dan Siber</li><li>• Operasional Pengamanan Persandian dan Siber</li><li>• Peningkatan Kapasitas SDM Sandi</li></ul>	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika	
4	<b>Keamanan dan Keselamatan Laut yang Terkendali</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sarpras Pendukung Keamanan Laut</li><li>• Sistem Informasi Kamla yang Terpadu</li><li>• Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum</li><li>• Pengembangan SDM Keamanan Laut</li></ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
5	<b>Lingkungan Bersih Penyalahgunaan Narkoba</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba</li><li>• Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba</li><li>• Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba</li><li>• Litbang Penanganan Narkoba</li></ul>	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan	
6	<b>Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deteksi Dini dan Penanggulangan Terorisme</li><li>• Penindakan Kejahatan Terorisme &amp; Deradikalisasi</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teknologi Intelijen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan lingkungan</li><li>• Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</li><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika</li></ul>	



## 18. PRIORITAS NASIONAL KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<p><b>Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Terkait HAM</li> <li>• Penegakan HAM</li> <li>• Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu</li> <li>• Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat</li> <li>• Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li>   <li>• Pendidikan HAM bagi Apgakum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan lingkungan</li>   <li>• Program perlindungan perempuan dan anak</li>   <li>• Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</li>   <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah</li> </ul>	
2	<p><b>Penegakan Hukum yang Berkualitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan &amp; Tindak Pidana Pencucian Uang</li> <li>• Transparansi &amp; Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan</li> <li>• Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum</li> <li>• Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif</li> <li>• Sistem Peradilan Perdata yang Mudah &amp; Cepat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penegakan Peraturan Daerah</li>   <li>• Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</li>   <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan</li> </ul>	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Budaya Hukum</li></ul>		Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	
3	<b>Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Anti Korupsi</li><li>Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi</li><li>Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi</li><li>Pencegahan Tindak Pidana Korupsi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</li><li>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan</li></ul>	

#### 19. PRIORITAS NASIONAL KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS DIPLOMASI

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan</li><li>Penanganan Transnational Organized Crime Melalui Kerjasama Maritim</li><li>Pengelolaan Konflik Laut Tiongkok Selatan</li></ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
2	<b>Pemantapan Peran di ASEAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan Keamanan</li><li>Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan Budaya</li><li>Penguatan Peran dalam Pilar Ekonomi</li></ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3	<b>Penguatan Lembaga Demokrasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu</li> <li>Peningkatan peran parpol melalui bantuan keuangan parpol</li> <li>Revisi UU Kepemiluan</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
4	<b>Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marginal</li> <li>Pengawasan partisipatif masyarakat terhadap pemilu</li> <li>Pusat Pendidikan Pemilih</li> <li>Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog Masyarakat</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
5	<b>Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>Peningkatan Kualitas Konten Informasi Publik</li> <li>Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</li> </ul>	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika	
6	<b>Pencegahan Konflik Sosial dan Penanggulangan Terorisme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di kalangan aparatur negara melalui pelaksanaan renaksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kebudayaan</li> </ul>	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)</li><li>• Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik</li><li>• Peningkatan upaya deradikalisasi dan kontra radikal terorisme</li><li>• Peningkatan penegakan hukum pada organisasi terorisme</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan lingkungan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</li></ul>	
7	<b>Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan Peran dalam Forum Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan di Tingkat Internasional</li><li>• Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral</li><li>• Peningkatan Kapasitas Diplomasi</li><li>• Pemanfaatan rezim internasional bidang energy dan food security</li><li>• Peningkatan Peran dalam Kerja Sama Teknik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Kerjasama Bidang Perdagangan</li><li>• Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan</li><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah</li></ul>	
8	<b>Penguatan Diplomasi Soft Power</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik</li><li>• Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang informasi dan pelayanan media</li><li>• Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di luar Negeri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat</li><li>• Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika</li><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah</li></ul>	
9	<b>Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri</b> Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri	-	-	Bukan kewenangan



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				Pemerintah Kota

## 20. PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<p><b>Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi</li> <li>Pengawasan yang Independen dan Profesional</li> <li>Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja</li> </ul>	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	
2	<p><b>Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, fasilitasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan pengelolaan RB Nasional</li> <li>Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa</li> </ul>	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan</li> </ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional</li><li>Penerapan Manajemen ASN</li><li>Penataan tata kelola birokrasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li><li>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li><li>Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah</li><li>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li><li>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li><li>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal</li><li>Program Penataan Daerah Otonom</li><li>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</li></ul>	<p>dan Prasarana Perkantoran</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur keuangan</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan</li></ul> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi</p>	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan kelembagaan birokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik</li> <li>• Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</li> <li>• Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah</li> <li>• Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</li> </ul>	<p>Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Statistik</li> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kearsipan</li> </ul> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah</p>	
3	<p><b>Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik</li> <li>• Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</li> <li>• Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal</li> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika</li> </ul>	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
----	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------

## 21. PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN KAWASAN EKONOMI (KEK)

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Peningkatan Populasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi Tumbuhnya industri baru</li><li>• Promosi Investasi</li><li>• Tax Holiday/Tax Allowance</li><li>• Kemudahan memulai usaha</li><li>• Pembangunan Science dan Technopark</li><li>• Pertumbuhan IKM</li><li>• Penumbuhan Industri Kreatif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif</li><li>• Program legalisasi usaha kreatif</li><li>• Program perkuatan permodalan usaha kreatif</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
2	<b>Produktivitas dan Daya Saing Industri</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan Industri Hijau</li><li>• Fasilitasi dan Insentif</li><li>• Pengembangan Infrastruktur Mutu</li><li>• Perbaruan Permesinan Industri</li><li>• Peningkatan Kemampuan Desain Produk</li><li>• SDM yang Kompetitif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya peternakan</li><li>• Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura</li><li>• Program pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan &amp; kelautan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanian</li><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan</li></ul>	
3	<b>Pengembangan Kawasan Industri/KEK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Lahan Kawasan Industri</li><li>• Konektivitas / Aksesibilitas</li><li>• Insentif Fiskal dan Non Fiskal</li><li>• Iklim Investasi PTSP (Penghapusan Perda Bermasalah)</li><li>• Penyediaan Tenaga Terampil dan Ahli (BLK, SMK, Akademi Komunitas, Politeknik)</li><li>• Mensosialisasikan mental Kewirausahaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program peningkatan iklim dan realisasi investasi</li><li>• Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial</li><li>• Program peningkatan kompetensi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal</li><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan</li></ul>	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Infrastruktur Dasar</li> </ul>	tenaga kerja dan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja</li> </ul>	
4	<p><b>Pembiayaan dengan akses dan biaya kompetitif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembiayaan Pembangunan Program Infrastruktur dan Industri</li> <li>Bantuan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Tanpa Agunan</li> <li>Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Sentral Mengenai Suku Bunga Kredit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Program perkuatan permodalan Usaha Mikro</li> <li>Program perkuatan permodalan usaha kreatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan</li> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</li> </ul>	
5	<p><b>SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan NSPK SDM Industri</li> <li>Peningkatan Kualitas SMK Industri</li> <li>Pembangunan Akademi Komunitas dan Politeknik Industri</li> <li>Pelatihan dan Sertifikasi SDM Industri</li> </ul>	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja	
6	<p><b>Hubungan Industrial yang Bersahabat</b></p> <p>Implementasi Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja</li> <li>Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan</li> </ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja	
7	<p><b>Pemberian Insentif Fiskal yang Harmonis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inisiasi Perjanjian Kerjasama Industri Luar Negeri Bilateral dan Multilateral</li> </ul>	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Insentif bagi Industri Bernilai Tambah Tinggi</li></ul>		Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	
8	<b>Ketersediaan Energi dan Infrastruktur</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan Aksesibilitas / Konektivitas</li><li>Peningkatan Kapasitas Ketenagalistrikan dan BBM</li><li>Ketersediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program pengelolaan kebersihan</li><li>Program perumahan permukiman</li><li>Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif</li><li>Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan\</li><li>Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li></ul>	
9	<b>Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan</li><li>Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Pertanian</li><li>Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Kelautan</li><li>Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Petrokimia</li><li>Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Migas</li></ul>	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pangan	
10	<b>Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif</b> Kebijakan Pembangunan Ekraf Perlindungan HKI Akses ke sumber modal	Program penguatan permodalan usaha kreatif	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pariwisata	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	Akses ke pasar			

## 22. PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN PARIWISATA

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Promosi Wisata Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promosi produk wisata</li> <li>Peningkatan Citra Pariwisata Nasional</li> <li>Promosi melalui Media Sosial, Elektronik dan Cetak</li> </ul>	Program pemasaran pariwisata	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pariwisata	
2	<b>Pengembangan Destinasi Wisata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan daya tarik wisata</li> <li>Pembangunan sarana dan prasarana transportasi</li> <li>Pembangunan fasilitas umum dalam kawasan</li> <li>Penyediaan BBM dan Listrik</li> <li>Kelembagaan Pengembangan destinasi</li> <li>Koordinasi pembangunan destinasi</li> </ul>	Program pengembangan destinasi wisata	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pariwisata	
3	<b>SDM dan Kelembagaan Pariwisata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan NSPK SDM dan Kelembagaan</li> <li>Peningkatan kualitas SMK pariwisata</li> <li>Peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Pariwisata</li> <li>Peningkatan kualitas pendidikan pariwisata di Luar Sekolah Pariwisata</li> <li>Pelatihan dan sertifikasi SDM Pariwisata</li> </ul>	Program pemasaran pariwisata	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pariwisata	
4	<b>Penciptaan Ekonomi Lokal dan Sikap Masyarakat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi perilaku masyarakat yang ramah dan bersahabat</li> <li>Penumbuhan industri dan usaha kecil pariwisata</li> </ul>	Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
5	<b>Layanan Kemudahan Wisatawan Mancanegara Masuk</b>	Program pengembangan	Perangkat Daerah Pelaksana	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemudahan pintu masuk udara</li><li>• Kemudahan pintuk masuk laut</li></ul>	destinasi wisata	Urusan Pembangunan Bidang Pariwisata	
6	<b>Jaminan Keselamatan, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Destinasi Wisata</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penciptaan destinasi wisata yang aman dan tertib</li><li>• Penciptaan destinasi wisata sehat</li></ul>	Program pengembangan destinasi wisata	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pariwisata	